



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KRIS SARJONO SUTEJO
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG UMUM
3. NHK : 26049

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 19.360.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m²/87 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 374 m²/150 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
3. Tanah Seluas 250 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 10.000.000.000
5. Tanah Seluas 522 m² di KAB / KOTA BANTUL, LAINNYA Rp. 2.610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 800.000.000

1. MOBIL, JEEP JEEP CJ7 Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOBIL, NISSAN X TRAIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 625.120.459**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 20.815.120.459



III. HUTANG

Rp.

1.420.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

19.395.120.459

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.